RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bulan: Juli 2020

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Undang-undang terdahulu tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam UURI NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang:

1. Penyempurnaan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2. Dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

3. Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

4. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.

5. Perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

7. Keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

8. Jaminan pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi

9. Mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

10. Menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaanya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

12. Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

13. Sanksi pidana dan sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	Analisis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/jurnal-prodigy/public-file/ \njurnal-prodigy-public-6.pdf
Jurnal	DIMENSI HUKUM PELANGGARAN KECELAKAAN LALU DAN ANGKUTAN JALAN LINTAS DI INDONESIA	http://jurnal.ensiklopediaku.o \nrg/ojs-2.4.8-3/index.php/sosia \nl/article/view/304/269
Jurnal	Kajian Yuridis Diskursus Pengaturan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Bermotor Umum	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/jurnal-prodigy/public-file/ \njurnal-prodigy-public-5.pdf
Jurnal	KECELAKAAN KM SINAR BANGUN: KEBUTUHAN AKAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN AIR DI INDONESIA	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-X-12-II-P3DI-Juni-2018-22 \n2.pdf?1591238448
Jurnal	KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR PADA SAAT MUDIK LEBARAN	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-20 \n8.pdf?1591236366
Jurnal	Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-IV-2-II-P3DI-Januari-2012 \n-53.pdf?1591236412
Jurnal	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: TANTANGAN DAN PROSPEK	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/jurnal_kajian/Jurnal%20 \nKajian-20-3-September-2015.pdf \n?1591236239
Jurnal	PERKEMBANGAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	http://jurnal.dpr.go.id/index. \nphp/ekp/article/view/67
Jurnal	UJI MATERI PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-X-11-I-P3DI-Juni-2018-215 \n.pdf?1591234897
Buku	Aman dan Nyaman Di Jalan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=226 \n34&keywords=jalan
Buku	Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=306 \n82&keywords=jalan
Buku	Busway: Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=216 \n79&keywords=jalan
Buku	Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=226 \n33&keywords=jalan
Buku	Hukum Pengangkutan Darat: Jalan & Kereta Api	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=312 \n72&keywords=jalan
Buku	Pengelolalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=159 \n86&keywords=jalan
Buku	Polisi dan Lalu-Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=512 \n8&keywords=lalu+lintas
Buku	Rekayasa Lalu-Lintas	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=306 \n98&keywords=jalan
Buku	Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=305 \n33&keywords=lalu+lintas
Buku	The World Bank Policy for Projects on International Waterways	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=204 \n12&keywords=lalu+lintas

Undang-undang & Peraturan	DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/draft-ruu/public-file/draft \n-ruu-public-3.pdf
Undang-undang & Peraturan	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	http://ojs.uma.ac.id/index.php \n/adminpublik/article/view/1581 \n/1497
Undang-undang & Peraturan	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/Inpres/inpres_no.4_ta \nhun_2013.pdf
Undang-undang & Peraturan	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/naskah-akademik/public-file \n/naskah-akademik-public-2.pdf
Undang-undang & Peraturan	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/naskah-akademik/public-file \n/naskah-akademik-public-14.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL	https://semarang.bpk.go.id/wp- \ncontent/uploads/2014/10/PERDA- \nNO.-6-Th.-2013-ttg-PENYELENGGA \nRAAN-TERMINAL.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI	https://pelayanan.jakarta.go.i \nd/download/regulasi/peraturan- \ndaerah-nomor-5-tahun-2014-tent \nang-transportasi.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS	http://portal.divkum.polri.go. \nid/Documents/PERATURAN%20KAPOL \nRI_10_25052016_092536.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS	http://ntb.polri.go.id/lantas/ \nwp-content/uploads/sites/28/20 \n17/03/perkap-no-15-th-2013-ttg \n-penanganan-lakalantas.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	http://ditjenpp.kemenkumham.go \n.id/arsip/bn/2012/bn259-2012.p \ndf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Perhubungan No. 26/2017 Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2017/PM_26_Tah \nun_2017.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Perhubungan No. 96/2015 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2015/PM_96_Tah \nun_2015.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2019/PM_15_TAH \nUN_2019_Update.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2014/pm_34_tah \nun_2014.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2019/PM_60_TAH \nUN_2019_rev.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/permen/2012/pm_no._10 \n_tahun_2012.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 37/2011 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2011/pp_no._37_tah \nun_2011.pdf

Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 74/2014 Angkutan Jalan	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2014/pp_74_tahun_2 \n014.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 8/2011 Angkutan Multimoda	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2011/pp_no._8_tahu \nn_2011.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2011/pp_32_tahun_2 \n011.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2017/PERATURAN_PEM \nERINTAH_NOMOR_37_TAHUN_2017.pd \nf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/54332/pp-no-41-tahu \nn-1999
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2012/pp_no._51_tah \nun_2012.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2012/pp_no._55_tah \nun_2012.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2013/pp_no._79_tah \nun_2013.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/pp/2012/pp_no._80_tah \nun_2012.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR	http://jdih.dephub.go.id/asset \ns/uudocs/perpres/2015/Perpres_ \n05_2015.pdf
Undang-undang & Peraturan	Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	https://www.researchgate.net/p \nublication/277091868_Perbandin \ngan_Undang-Undang_Nomor_14_Tah \nun_1992_tentang_Lalu_Lintas_Da \nn_Angkutan_Jalan_dengan_Rancan \ngan_Undang-Undang_Republik_Ind \nonesia_Tentang_Lalu_Lintas_dan \n_Angkutan_Jalan
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Di Jalan (Risalah Rapat Pembahasan)	http://dpr.go.id/arsip/indexlg \n/id/612
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://dpr.go.id/dokjdih/docum \nent/uu/782.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	http://dpr.go.id/dokjdih/docum \nent/uu/UU_2009_22.pdf
Surat kabar	ANGKUTAN UMUM - Integrasi Masih Jadi PR Besar	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10370
Surat kabar	Angkutan Umum Sewa, Taksi Online Lolos Uji KIR Masih Minim	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/5686
Surat kabar	Angkutan Umum: PR Menggunung Revitalisasi Terminal	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/7245
Surat kabar	Aplikasi Transportasi 2017, Taksi Online Gerus Angkutan Umum	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/5017
Surat kabar	Belajar Menangkal Virus Korona di Angkutan Umum dari Negara Lain	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/10880

Surat kabar	Bikin Susah Masyarakat Saja: Wacana Ganjil-Genap Saat Mudik Baiknya Dikaji Lagi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/28313
Surat kabar	DPR Percepat Legalisasi Ojek Online	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38304
Surat kabar	DPR Wacanakan Revisi UU Lalu lintas	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/28188
Surat kabar	Dukung Rekayasa Lalu Lintas, Komisi V Dorong Mudik Tahun Ini Zero Accident	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36403
Surat kabar	KEBIJAKAN LALU LINTAS: Organda Dukung Perluasan Ganjil Genap	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10289
Surat kabar	Korona Memantik Kesadaran akan Kesehatan di Angkutan Umum	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10892
Surat kabar	Manajemen Lalu Lintas Membaik, Komisi V Usul Anggaran Korlantas Polri Ditambah	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36745
Surat kabar	Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi V DPR : Perlu Payung Hukum Mudik Pakai Motor	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/29308
Surat kabar	Peraturan untuk Ojek: DPR Buka Usul Revisi Aturan Transportasi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/28259
Surat kabar	Perlu Evaluasi Transportasi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/1374
Surat kabar	PT CMNP Akan Bangun Tol Sepeda Motor	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/35835
Surat kabar	Revisi UU Lantas Mendesak	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/31375
Surat kabar	Sistem Intermoda Disepakati Masuk RUU	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/29277
Surat kabar	Skenario Terbaik untuk Angkutan Umum di Tengah Wabah Covid-19	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10971
Surat kabar	Surat Edaran Kemenhub Belum Bisa Jadi Dasar Pembatasan Angkutan Umum	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11017
Surat kabar	SURVEI WARGA - Tidak Cukup Tambah Jalan, Perlu Kebijakan Lalu Lintas Mendasar	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/2161
Surat kabar	Taksi Online: DPR Siap Revisi UU Lalu Lintas	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/22291
Surat kabar	TRANSPORTASI PUBLIK: Metamorfosis Angkutan Umum di Jakarta	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10544
Surat kabar	UU Lalu Lintas Mending Direvisi Saja	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/25534
Surat kabar	UU LLAJ Digugat Ke MK	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/33881